

BAB III

PELANGGARAN HAM TERHADAP ROHINGYA

Di dalam bab ini akan dibahas mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh etnis Rohingya. Pembahasan tersebut akan diawali dengan pemaparan mengenai sejarah dari etnis Rohingya, eksistensi etnis Rohingya di Myanmar, perlakuan yang diterima etnis Rohingya di Myanmar, dan awal mula penindasan yang dialami etnis Rohingya.

A. Sejarah Etnis Rohingya

Mendengar kata etnis Rohingya tentunya bukan menjadi hal yang asing lagi bagi sebagian orang. Etnis Rohingya merupakan salah satu etnis yang sedang ramai diperbincangkan dan menjadi perhatian masyarakat dunia akibat konflik yang terjadi terhadap mereka yang merupakan etnis minoritas muslim di Myanmar. Meskipun banyak sekali masyarakat dunia yang sedang memperbincangkan etnis Rohingya, namun banyak sekali dari kita yang masih belum mengetahui tentang sejarah dari etnis Rohingya itu sendiri.

Istilah Roang/Rohang/Roshang adalah beberapa nama kuno dari Arakan. Istilah tersebut kemungkinan diambil dari kata rahham (berkat, rahmat) dalam bahasa Arab yang berarti “yang diberkahi” (Bustamam, 2013). Sementara itu, istilah Rohingya berasal dari kata Rohai atau Roshangee, kemudian mengalami penyimpangan terminologi menjadi Rohingya. (Bustamam, 2013)

Etnis Rohingya merupakan kelompok etnis yang bertempat tinggal di daerah Arakan atau yang lebih dikenal dengan Rakhine. Kehadiran etnis Rohingya di Arakan sudah ada sejak abad ke-8M. Secara demografis, Arakan terletak di sebelah barat Myanmar, lebih tepatnya di pesisir Timur Teluk Bengal. Arakan berpenghuni sekitar 5 juta penduduk yang dikenal dengan sebutan Rakhaing. Wilayah Arakan terbagi menjadi dua etnis yaitu etnis Rohingya dan etnis Rakhie. Etnis Rohingya merupakan etnis yang mayoritas penduduknya memeluk agama

islam, sedangkan etnis Rakhine merupakan etnis yang mayoritas penduduknya memeluk agama budha. (Hartimah, 2010)

Meskipun telah berabad-abad tinggal di Myanmar, pemerintah Myanmar menganggap bahwa Rohingya termasuk dalam etnis Bengali sehingga tidak dapat diakui sebagai salah satu etnis Myanmar (Gede Sudika Mangku, 2013). Etnis Rohingya merupakan etnis yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Hal tersebut yang menjadikan etnis Rohingya menjadi salah satu etnis minoritas di Myanmar, hal ini disebabkan karena banyak yang mengklaim bahwasanya mayoritas penduduk Myanmar beragama Budha. Negara mengklaim bahwa 3% dari penduduk Myanmar terdiri dari umat Islam, namun penelitian lain menunjukkan bahwa populasi mereka bisa mencapai 13%, dan masyarakat muslim diyakini berjumlah sekitar tujuh juta jiwa di Myanmar (Bustamam, 2013)

Pada awal tahun 1950-an, etnis Rohingya yang mayoritas masyarakatnya beragama islam mengklaim diri mereka sebagai sekelompok etnis yang berbeda dan terpisah. Mereka juga mengklaim bahwasanya etnis mereka telah ada di Burma sejak generasi terdahulu. Namun, klaim tersebut tidak berhasil. Mereka tidak mendapatkan pengakuan dari Myanmar dan keberadaannya diperdebatkan oleh kaum Budha yang merupakan mayoritas di negara tersebut (Republika, 2017).

Etnis Rohingya tidak mendapatkan hak dan kesempatan untuk hidup seperti layaknya masyarakat lain di Myanmar. Ada begitu banyak etnis yang terdapat di Myanmar. Secara umum, baik versi pemerintahan, sejarawan, maupun akademisi lebih cenderung mempublikasikan bahwa di Burma terdapat 135 suku, yang terbesar antara lain suku Burman, Chin, Kachin, Shan, Arakan (Rakhaing), Kayah (Karenni), Karen, dan Mon. Meskipun pemerintah mengklaim terdapat 135 “ras”, tidak ditemukan data resmi terkait jumlah etnis minoritas di Burma (Bustamam, 2013).

Etnis Rohingya menjadi etnis yang tidak dianggap dan tidak diakui keberadaannya oleh Myanmar. Hal tersebut yang menyebabkan etnis Rohingya harus kehilangan kewarganegaraannya dan sering sekali mendapat tindak

kekerasan dan diskriminasi dari warga Myanmar. Mereka sering sekali mengalami perampasan berbagai macam hak sipil, ekonomi, politik dan sosial, sehingga kondisi etnis Rohingya menjadi sangat terpuruk. Tidak sedikit dari etnis Rohingya yang mencoba untuk mengungsi dan melarikan diri ke Negara-negara tetangga, mereka berharap akan diterima dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak di Negara-negara tersebut. Namun pada kenyataannya, banyak sekali Negara-negara yang tidak mau menerima keberadaan etnis Rohingya. (Metro Tv News, 2017)

Pada tahun 1785, banyak sekali warga Rohingya yang dipindahkan ke Negara Bangladesh oleh pemerintah Myanmar. Hal ini dikarenakan adanya politik diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar (Metro Tv News, 2017). Pemerintah Myanmar tak mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya karena menganggap kelompok Muslim ini bukan merupakan kelompok etnis yang sudah ada di Myanmar sebelum kemerdekaan Myanmar pada 1948. Hal itu ditegaskan kembali oleh Presiden Myanmar, Thein Sein, dalam Al Jazeera, 29 Juli 2012 bahwa Myanmar tak mungkin memberikan kewarganegaraan kepada kelompok Rohingya yang dianggap imigran gelap dan pelintas batas dari Bangladesh (Joko Waluyo, 2013).

Populasi dari etnis Rohingya itu sendiri terbilang cukup banyak. Pada tahun 1990, jumlah populasi dari etnis Rohingya ini mencapai 4 juta jiwa. Dan angka tersebut turun drastis pada tahun 2017 ini yang hanya tersisa 1,3 juta jiwa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh konflik yang menimpa etnis Rohingya yang tidak kunjung selesai. Di khawatirkan angka tersebut akan terus menurun setiap tahunnya. (Metro Tv News, 2017)

B. Eksistensi Etnis Rohingya di Myanmar

Kemunculan pemukiman Muslim di Arakan sebagai cikal bakal kelompok Rohingya terlacak sejak zaman Kerajaan Mrauk U, khususnya pada zaman Raja Naramekhla (1430-1434). Setelah dibuang ke Bengal, Naramekhla lalu menguasai kembali Mrauk U berkat bantuan Sultan Bengal. Seiring dengan berkuasanya Naramekhla, masuk pula penduduk Muslim dari Bengal kewilayah Arakan, Rakhine. Jumlah penduduk Muslim

dari Bengal semakin hari semakin bertambah, terutama ketika Inggris menguasai Rakhine. Karena kurangnya populasi di Rakhine, Inggris memasukkan banyak orang Bengali ke Rakhine untuk bekerja sebagai petani. Oleh karena itu, sampai saat ini pula, kebanyakan orang Rohingya bekerja di sektor agraris (Yulia Hartati, 2013).

Etnis Rohingya merupakan kelompok masyarakat yang telah menetap di Negara Myanmar tepatnya di wilayah Arakan atau Rakhine. Sebagai komunitas yang sudah lama menetap di wilayah Arakan, tentu saja sudah selayaknya mereka mendapatkan hak-hak dasar mereka, terutama status kewarganegaraan. Namun kenyataannya Myanmar tidak mengakui dan juga memberikan kewarganegaraan kepada etnis Rohingya. Pemerintah Myanmar menawarkan solusi berupa pengiriman ribuan orang Rohingya ke negara lain atau tetap tinggal di Arakan, tetapi berada di bawah pengawasan PBB (Joko Waluyo, 2013)

Alasan pemerintah Myanmar tak ingin mengakui etnis Rohingya sebagai warga Negara Myanmar adalah karena mereka menganggap kelompok Muslim Rohingya ini bukan merupakan kelompok etnis yang sudah ada di Myanmar sebelum kemerdekaan Myanmar pada 1948. Hal itu ditegaskan kembali oleh Presiden Myanmar, Thein Sein, dalam Al Jazeera, 29 Juli 2012 yang menegaskan bahwa Myanmar tak mungkin memberikan kewarganegaraan kepada kelompok Rohingya yang dianggap imigran gelap dan pelintas batas dari negara Bangladesh. Karena tidak mendapat pengakuan dan menjadi kelompok masyarakat yang tidak memiliki kewarganegaraan, akhirnya Masyarakat Rohingya tidak diperbolehkan untuk bekerja. Segala macam pekerjaan seperti pengajar, perawat, abdi masyarakat, dan berbagai macam pekerjaan lainnya dilarang oleh pemerintah Myanmar. (Yulia Hartati, 2013).

Jumlah muslim Rohinya yang menempati Myanmar khususnya di wilayah Arakan itu sendiri berjumlah sekitar 3,5 juta jiwa (Hartimah, 2010). Disaat Inggris melakukan sensus penduduk pada tahun 1911, jumlah Muslim yang sudah ada di Arakan telah bertambah jumlahnya menjadi sekitar 58 ribu

orang. Jumlah tersebut semakin bertambah pada tahun 1920-an ketika Inggris menutup perbatasan India, sehingga orang Bengali memilih masuk ke Rakhine. Sejak tahun-tahun tersebut mulai timbul konflik-konflik antara penduduk asli yang mayoritas beragama Budha (Yulia Hartati, 2013).

C. Krisis Kemanusiaan di Myanmar

Seperti yang kita tahu bahwasanya di Myanmar sedang terjadi krisis kemanusiaan yang sedang mencuri perhatian dari masyarakat dunia. Berikut ini akan dijelaskan mengenai awal mula krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar, factor-faktor penyebab konflik antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine di Myanmar, bentuk-bentuk pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya yang dilakukan oleh etnis Rakhine dan pemerintah Myanmar, dan yang terakhir adalah mengenai tanggapan masyarakat dunia terhadap krisis kemanusiaan di Myanmar.

1. Awal Mula Krisis Kemanusiaan di Myanmar

Konflik yang terjadi antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine beberapa tahun terakhir ini sedang menjadi sorotan dunia. Konflik yang terjadi antara etnis Rakhine dan etnis Rohingya semakin hari semakin memanas. Tidak sedikit etnis Rohingya yang harus kehilangan nyawa akibat kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh etnis Rakhine. Kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh Myanmar tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu.

Konflik besar yang terjadi antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine muncul pada tahun 2012. Konflik tersebut berawal pada tanggal 28 Mei 2012, dimana pada saat itu terdapat tiga orang yang diduga berasal dari etnis Rohinya telah melakukan pemerkosaan serta pembunuhan terhadap seorang gadis dari etnis Rakhine berusia 28 tahun. Pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh 3 orang pemuda Rohingya tersebut rupanya menimbulkan amarah yang sangat besar bagi etnis Rakhine. Etnis Rakhine merasa

tidak terima atas perlakuan 3 orang pemuda tersebut kepada salah seorangarganya yang sama-sama berasal dari etnis Rakhine tersebut. Etnis Rakhine berpendapat bahwasanya hal tersebut merupakan bentuk pelecehan. Etnis Rakhine pun tidak terima dan menimbulkan aksi balas dendam. Aksi balas dendam yang dilakukan oleh etnis Rakhine tersebut terjadi pada tanggal 3 Juni 2012. Pada saat itu terjadi pembunuhan terhadap 10 orang laki-laki muslim yang dilakukan oleh sekelompok orang dari etnis Rakhine yang terjadi di dalam bus, diduga pada saat itu bus tersebut berisikan 3 orang pelaku pemerkosaan seorang gadis Rakhine. Presiden Thein sein mengumumkan kondisi darurat pada tanggal 10 Juni 2012. Pada saat itu kondisi antara etnis Rakhine dan Rohingya terus memanas sehingga terjadi bentrokan yang menyebabkan 88 orang tewas dan lebih dari 90.000 orang mengungsi (Raharjo, Peran Identitas Agama Dalam Konflik di Rakhine Myanmar Tahun 2012–2013, 2015).

2. Faktor-faktor penyebab konflik di Myanmar

a. Faktor Politik

Junta militer melakukan penyebaran pamphlet-pamphlet yang berisikan kebencian dan anti muslim yang ditujukan kepada etnis Rohingya. Perlakuan junta militer tersebut menyebabkan banyak biksu yang terpengaruh dan ikut menyebarkan selebaran-selebaran yang juga berisikan anti muslim Rohingya. Hal tersebut menimbulkan kebencian terhadap etnis Rohingya sehingga etnis Rohingya mendapat perlakuan-perlakuan yang tidak sewajarnya. Penyebaran kebencian yang dilakukan oleh junta militer dan biksu-biksu tersebut akhirnya menimbulkan rasa dendam etnis Rohingya dan menyebabkan konflik yang sangat sulit untuk didamaikan (Revolusi, 2013).

b. Faktor Ekonomi

Pada masa pemerintahan Than Shwe, junta militer telah melakukan pengalihan sumber pendapatan dan

mengatur kesempatan kerja agar lebih merata kepada masyarakat, peningkatan pelayanan masyarakat kelas bawah, melakukan reformasi tanah dan kredit yang bersifat liberal kepada petani, menaikkan tingkat gaji minimum, memperluas jaminan sosial, kesehatan, rencana pendidikan, menarik perusahaan swasta menjadi milik negara, menarik pajak secara merata dan dikelola oleh negara . Namun, kebijakan pemerintah tidak kunjung memperbaiki perekonomian nasional khususnya Provinsi Arakan/Rakhine yang tingkat perekonomiannya jauh lebih terbelakang dan mengalami krisis ekonomi. Hal itu dikarenakan kebijakan sangat lemah, peraturan resmi yang tidak memberikan sanksi tegas bagi yang melanggarnya terutama bagi pihak junta militer sendiri (Revolusi, 2013). Dikarenakan krisis ekonomi yang melanda wilayah Rakhine/ Arakan ini menyebabkan etnis Rakhine berfikir bahwasanya kehadiran etnis Rohingya di wilayah tersebut akan akan mengurangi hak atas lahan dan ekonomi (Triono, 2014)

Selain dua faktor di atas, terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya krisis kemanusiaan di Myanmar. Banyak faktor yang menjadi pemicu awal meledaknya konflik yang berkepanjangan ini, mulai dari kasus pemerkosaan, diskrimasi warga minoritas dan masalah entitas etnis. Perlakuan diskriminatif terhadap Etnis Rohingya, antara lain disebabkan oleh status mereka yang berbeda. Tidak seperti etnis lain, Etnis Rohingnya tidak diakui sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar, melainkan sebagai pendatang ilegal (Triono, 2014).

Akar konflik dari masalah yang terjadi antara etnis Rohingya dan Rakhine adalah kecemburuan yang timbul terhadap etnis Rohingya yang dalam beberapa dasawarsa ini terus meningkat jumlahnya. Hal ini menyebabkan kecurigaan dan kecemburuan pada etnis mayoritas Rakhine. Bagi mereka, keberadaan etnis Rohingnya pun dianggap sangat mengganggu. (Triono, 2014).

3. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap etnis Rohingya

a. Etnis Rakhine

Sebagian masyarakat Rakhine dan Burma menolak untuk mengakui Rohingya sebagai golongan etnis, dan mereka telah ditolak dalam keanggotaan Dewan Nasional Etnis. Penduduk Myanmar tidak pernah mengakui warga Rohingya etnis Bengali sebagai etnis, mereka menganggap sebagai “Muslim Arakan”, “Muslim Burma” atau “Bengal dari Burma” adalah nama-nama yang disematkan kepada Rohingya sebagai bahan ejekan.

b. **Junta Militer/ Pemerintah Myanmar** (Pramono, Peran UNHCR Dalam Menangani pengungsi Myanmar Etnis Rohingya di bangladesh (Periode 1978-2002), 2010)

1) Penolakan pemberian kewarganegaraan

Adanya UU Kewarganegaraan tahun 1982 yang menjadikan warga Rohingya etnis Bengali tidak diakui kewarganegaraannya membuat nasib mereka penuh dengan ketidakpastian bahkan mereka sering mendapatkan perlakuan sadis dari junta militer Myanmar (Revolusi, 2013). Presiden Thein Sein mengatakan kepada UNHCR bahwa etnis Rohingya bukan merupakan tanggung jawab dari Myanmar karena ia menganggap bahwasanya etnis Rohingya merupakan kelompok masyarakat pelintas batas yang illegal dan juga menganggap etnis Rohingya sebagai sebuah ancaman terhadap keamanan nasional sehingga mereka harus dipindahkan ke negara-negara ketiga yang bersedia menerima mereka (Yulia Hartati, 2013).

2) Pembatasan untuk berpindah

Pemerintah Myanmar melarang keras etnis Rohingya untuk berpindah. Etnis Rohingya dilarang untuk bepergian dari satu desa ke desa lain. Untuk pergi ke luar desa diperlukan izin yang sudah pasti sangat sulit untuk didapatkan. Hal ini dikarenakan pemerintah Myanmar menjadikan etnis Rohingya

sebagai pekerja paksa (Pramono, Peran UNHCR Dalam Menangani pengungsi Myanmar Etnis Rohingya di Bangladesh (Periode 1978-2002), 2010).

3) Pembatasan dalam kegiatan ekonomi.

Pemerintah Myanmar sangat membatasi etnis Rohingya untuk melakukan kegiatan ekonomi. Pemerintah Myanmar juga menolak memberi izin usaha kepada Rohingya. Pemerintah Myanmar menerapkan pajak yang sangat tinggi kepada etnis Rohingya yang mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai petani dan nelayan. Akibatnya banyak lahan pertanian, tambak dan property milik etnis Rohingya yang disita oleh pemerintah Myanmar karena etnis Rohingya tidak mampu untuk membayar pajak.

4) Pembatasan bidang pendidikan

Anak-anak dari etnis Rohingya dibatasi dalam hal pendidikan. Mereka dilarang masuk ke dalam perguruan tinggi yang ada di Myanmar. Bahkan pemerintah Myanmar juga melarang anak-anak Rohingya untuk melanjutkan pendidikannya di luar Myanmar.

5) Perlakuan yang tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia

Banyaknya perlakuan yang sangat tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya. Perlakuan-perlakuan tersebut antara lain seperti penjarahan, pembakaran hidup-hidup, pengrusakan tempat tinggal dan rumah ibadah, pemerkosaan, serta pembunuhan secara sewenang-wenang (Revolusi, 2013).

4. Kondisi Etnis Rohingya

Konflik yang berlangsung antara Rohingya dengan pemerintah Myanmar ini tidak menunjukkan adanya titik terang. Semakin hari kondisi rakyat Rohingya semakin mengkhawatirkan. Banyak dari mereka yang mengalami trauma yang sangat berat diakibatkan perlakuan yang diberikan oleh tentara Myanmar. Para pengungsi Rohingnya punya banyak ingatan buruk tentang bagaimana mereka menghindari gempuran militer Burma serta menyaksikan desa-desa mereka diratakan dengan tanah. Pada awal September, Human Rights Watch mewawancarai lebih dari 50 pengungsi Rohingnya yang berhasil melintasi perbatasan ke Bangladesh dan memperoleh kesaksian terperinci dari puluhan orang. Kepada Human Rights Watch para pengungsi itu mengatakan, pasukan keamanan pemerintah Burma menyerang warga desa dengan senjata api, mengakibatkan luka tembak dan cedera karena pecahan proyektil, serta membakar rumah-rumah mereka. Mereka juga menyatakan bahwa militer menggunakan senjata api kecil, mortir, dan helikopter perang dalam serangan-serangan tersebut (Human Rights Watch, 2017).



Gambar 3. 1 Korban Kekerasan Tentara Myanmar

Sumber: <https://www.hrw.org>

Kekerasan yang dilakukan oleh tentara Myanmar tersebut dilakukan tanpa memandang apakah mereka wanita, pria, bahkan anak-anak pun juga turut menjadi korban kekerasan tentara Myanmar. Gambar tersebut membuktikan bahwasanya seorang anak kecil menjadi korban tentara Myanmar dengan cara ditembak di bagian dada.

Para pengungsi Rohingya yang selamat tersebut masih mengingat jelas pasukan keamanan mengepung daerah mereka, menembaki kerumunan yang berkumpul dan mereka yang berusaha melarikan diri. Mereka memisahkan laki-laki dan perempuan, menjaga perempuan dan anak-anak di air dangkal sementara secara sistematis menembaki sejumlah lelaki atau menusuk mereka dengan pisau sampai mati. Shawfika (24 tahun) yang melihat suami dan bapak mertuanya dibunuh, mengatakan pembunuhan di pantai itu berlangsung selama beberapa jam. Ia mengatakan bahwasanya tentara Myanmar terus menangkap sejumlah lelaki, memaksa mereka berlutut dan membunuh mereka.

Mereka lantas menumpukkan tubuh-tubuh itu. Pertama-tama mereka menembak para lelaki, dan jika mereka masih hidup, menebasnya dengan parang. Mereka butuh waktu sekitar satu setengah jam untuk membawa semua mayat itu (Human Rights Watch, 2017).

Para korban selamat juga menyampaikan traumanya karena melihat anak-anak kecil diseret menjauhi para ibu dan dibunuh, dilemparkan ke dalam api atau sungai, atau dipukuli atau ditusuk sampai mati di tanah. Hassina Begum (20 tahun) seorang ibu yang mencoba menyembunyikan putrinya yang masih berusia 1 tahun bernama Sohaifa, ia meletakkannya di bawah jilbabnya, namun seorang tentara menyadari hal itu. Kemudian tentara tersebut mengambil anak perempuan tersebut dari tangannya dan melemparkannya hidup-hidup ke dalam kobaran api (Human Rights Watch, 2017) .

Para prajurit itu kemudian membawa perempuan dan anak-anak ke rumah-rumah terdekat dalam beberapa kelompok kecil, di mana banyak perempuan diperkosa dan mengalami penyerangan seksual, ditikam, dan dipukuli. Sembilan perempuan dan anak perempuan yang diwawancarai oleh Human Rights Watch bercerita bahwa mereka diperkosa atau mengalami penyerangan seksual, dan menyaksikan orang-orang lain diperkosa. Setelah itu, para tentara mengunci dan membakar sejumlah rumah, membiarkan perempuan dan anak-anak di dalam, yang sebagian besar dalam keadaan pingsan atau meninggal dunia. Segala bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh tentara Myanmar tersebut jelas menimbulkan trauma yang sangat berat bagi rakyat Rohingya (Human Rights Watch, 2017).

Selain itu, banyak sekali rakyat Rohingya yang tidak mendapat cukup makan dan obat-obatan. Kegiatan bantuan internasional di sebagian besar Negara Bagian Rakhine telah ditahan oleh pemerintah Myanmar, menyebabkan sekitar 250.000 orang hidup tanpa makanan, perawatan medis, dan bantuan kemanusiaan penting lainnya. Pengungsi mengatakan kepada Human Rights Watch kalau sementara

banyak orang dari Kota Maungdaw bisa melarikan diri ke Bangladesh, puluhan ribu pengungsi Rohingya masih bersembunyi di daerah sekitar Kota Rathedaung dan Buthidaung (Human Rights Watch, 2017).



Gambar 3. 2 Pengungsi Rohingya Menjalani Hari-hari Mereka di Luar Tenda Penampungan.

Sumber: <https://www.hrw.org>

Penduduk Rohingya setiap hari menjalani hari-harinya di penampungan dengan makanan yang seadanya. Mereka tidak memiliki cukup makanan, minuman serta obat-obatan. Hal tersebut menyebabkan banyaknya penduduk Rohingya yang mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Banyak dari anak-anak rohingya pun yang mengalami gizi buruk dan juga tidak mendapatkan pendidikan selama di penampungan. Mereka hanya mengharapkan bantuan yang datang dari organisasi-organisasi kemanusiaan dan lain sebagainya.

5. Dampak krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar

Konflik yang terjadi antara kelompok Budha dengan kelompok Muslim di Rakhine sejak tahun 2012 hingga 2013 telah menelan korban hampir 200 orang tewas dan lebih dari

127.000 orang harus pergi meninggalkan kampung halaman mereka (Habibollahi, McLean, & Diker 2013). Dampak konflik tidak hanya terasa oleh Myanmar sendiri, tetapi juga oleh negara-negara tetangga dan satu kawasan. Sekitar 25.000 korban konflik melarikan diri ke Bangladesh, India, Thailand, Malaysia, dan Indonesia yang menimbulkan permasalahan baru di negara-negara tersebut. Oleh karena itu, konflik berbau agama harus segera diselesaikan agar dampak konflik tidak semakin parah dan meluas (Raharjo, Peran Identitas Agama Dalam Konflik di Rakhine Myanmar Tahun 2012-2013, 2015).

konflik Rohingya telah menyebabkan sekitar 43 persen penduduknya menjadi pengungsi, dan lebih dari 87 persen dari mereka kekurangan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pelayanan kesehatan dan akses pendidikan bagi anak-anak mereka. Yang jelas, konflik ini telah menjadi tragedi kemanusiaan, perdamaian dan keamanan dunia yang punya implikasi terhadap kawasan ASEAN. Krisis kemanusiaan ini memberikan dampak langsung maupun tidak langsung kepada beberapa Negara tetangga. Hal ini terutama baerhubungan dengan isu keamanan yang berkaitan dengan para pengungsi Rohingya yang memasuki beberapa Negara tetangga dalam upaya mencari keamanan dari tekanan rezim pemerintahan Myanmar. Akibatnya isu ini pun berkembang menjadi isu kawasan (Yumitro, 2017).

Tentunya berita mengenai krisis kemanusiaan yang menimpa etnis muslim Rohingya di Myanmar ini sudah terdengar oleh seluruh dunia termasuk dua Negara muslim terbesar di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia dan Malaysia. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan kemungkinan munculnya kelompok radikal garis keras yang melakukan aksi terorisme atas dasar solidaritas. Bahkan di Indonesia, hampir saja terjadi peledakan terhadap kantor kedutaan Myanmar di Jakarta. Beruntung rencana tersebut berhasil di gagalkan oleh pihak keamanan di Indonesia. Di tempat lain di Asia Tenggara, pihak berwenang telah mengumpulkan beberapa orang Bangladesh yang bersimpati

dengan ISIS. Dr Iftekhar Ahmed Chowdhury, mantan menteri luar negeri Bangladesh sekarang dengan Institute of South Asian Studies, mengatakan bahwa dia khawatir bahwa kamp-kamp pengungsi besar di negaranya bisa berubah menjadi tempat berkembang biak ekstremisme dengan cara pengungsi Afghanistan yang menetap di Pakistan mengubah negara itu menjadi sarang terorisme. (Velloor, 2017)

Krisis Rohingya telah menimbulkan respons yang kuat dari masyarakat Islam di ASEAN, sehingga menyulitkan negara-negara ASEAN untuk menjauhkan diri dari krisis. Misalnya, serangkaian demonstrasi diadakan di kota-kota seperti Kuala Lumpur setelah krisis. Para demonstran meminta pemerintah mereka untuk menghukum pemerintah Myanmar dan bahkan meminta negara mereka memutuskan hubungan diplomatik (Liping, 2017). Kehadiran pengungsi Rohingya dapat memberikan dampak buruk karena untuk bertahan hidup para pengungsi harus menebang hutan. Thailand juga menghadapi masalah yang sama karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh Thailand untuk menerima pengungsi (Pramono, Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis Rohingya di Bangladesh, 2010). Disamping itu, pengungsi Rohingya yang mengalir ke Asia Tenggara memicu berkembangnya jaringan penyelundupan dan perdagangan manusia, khususnya di Thailand (Pujayanti, 2017)

6. Peta Persebaran Pengungsi Rohingya

Segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar menyebabkan etnis Rohingya memilih untuk mengungsi ke Negara-negara lain agar mendapatkan hidup yang lebih baik. Berikut ini adalah gambar peta yang menunjukkan persebaran pengungsi Rohingya.

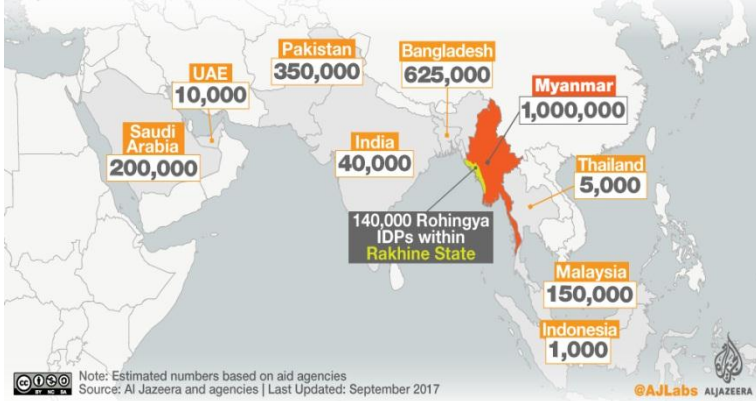


Gambar 3. 3 Peta Persebaran Pengungsi Rohingya
 Sumber: <https://www.quora.com>

Penduduk Rohingya yang merupakan mayoritas beragama muslim tentunya memilih untuk mengungsi ke Negara-negara tetangga yang mayoritas negaranya berpenduduk muslim juga. Negara-negara tersebut antara lain adalah Bangladesh, Malaysia dan Indonesia.

Following Myanmar's fleeing Rohingya

Since the late 1970s, nearly one million Rohingya Muslims have fled Myanmar due to widespread persecution.



Gambar 3. 4 Peta Persebaran Pengungsi Rohingya
Sumber: Al Jazeera News

Jumlah pengungsi Rohingya di berbagai Negara semakin hari semakin meningkat. Persebarannya pun mulai mencakup ke berbagai Negara. Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwasanya ada sekitar 1000 pengungsi di Indonesia, 150.000 pengungsi di Malaysia, 5000 pengungsi di Thailand, 625.000 pengungsi di Bangladesh, 350.000 pengungsi di Pakistan, 10.000 pengungsi di UEA, dan ada sekitar 200.000 pengungsi Rohingya di Saudi Arabia. Jumlah tersebut di khawatirkan akan terus bertambah mengingat konflik yang terjadi di Myanmar tidak kunjung selesai (Al Jazeera, 2017).

7. Tanggapan Dunia terhadap krisis kemanusiaan di Myanmar

Melihat krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar, dunia internasional terkejut karena dalam waktu yang bersamaan Myanmar sedang mengalami proses demokrasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa

mengancam kekerasan yang terjadi pada konflik tersebut, namun tidak menyalahkan pemerintahan Myanmar sebagai penyebab dari konflik tersebut. Lembaga lain seperti Amnesty Internasional dan Organisasi HAM (Hak Asasi Manusia) dunia menilai bahwa pemerintah Myanmar telah melakukan diskriminasi secara sistematis terhadap etnis Rohingnya yang telah menyebabkan penderitaan etnis Rohingnya yang tak kunjung usai (Triono, 2014).

Krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar banyak mendapat kecaman dan protes bagi Negara-negara dunia khususnya Negara-negara muslim di berbagai Negara di Asia, Australia, dan Rusia. Banyak sekali terjadi unjuk rasa di Negara-negara tersebut sebagai bentuk dukungan bagi etnis Rohingya dan sebagai desakan bagi Pemerintah Myanmar untuk segera mengakhiri penderitaan dan krisis kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar. Para demonstran menyayangkan sikap Aung San Suu Kyi yang terkesan hanya diam melihat krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya. Padahal Aung San Suu Kyi merupakan salah satu tokoh yang mendapatkan nobel perdamaian. Banyak sekali petisi online yang mendesak komite nobel untuk mencabut nobel perdamaian Aung San Suu Kyi (Tempo.co, 2017). Berikut ini akan dipaparkan tanggapan dari Negara Thailand, Indonesia, Malaysia dan juga Amerika Serikat terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

8. Tanggapan Thailand terhadap krisis kemanusiaan di Myanmar (Vinanda, 2017)

Pemerintah Thailand mengaku terus mengawasi perkembangan krisis Rohingya dengan ketat. Pernyataan tersebut disampaikan secara resmi oleh pihak Kementerian Luar Negeri Thailand. Selain itu, Otoritas Negeri Gajah Putih juga menyatakan akan segera mengirim bantuan ke Myanmar dan Bangladesh. Kementerian Luar Negeri Thailand mengatakan bahwasanya Thailand akan memberi

perhatian penuh terhadap perkembangan situasi di Negara Bagian Rakhine. Pemerintah Kerajaan Thailand selalu menaruh perhatian besar untuk memberikan perawatan dan perlindungan kepada orang-orang Rohingya. Pemerintah Thailand menyatakan, sepenuhnya mendukung sikap ASEAN yang mengancam kekerasan terhadap warga Rohingya. Pada pekan lalu, Badan Amnesti Internasional juga telah menghimbau Thailand untuk berhenti mengusir pengungsi Rohingya kembali ke laut karena khawatir akan memicu gelombang baru manusia perahu.

9. Tanggapan Indonesia terhadap krisis kemanusiaan di Myanmar (DW, 2017)

Presiden Joko Widodo, menyebutkan Indonesia perlu melakukan upaya nyata untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan di Myanmar. Selain memberikan bantuan obat-obatan dan makanan, Indonesia juga turut membantu membangun sebuah rumah sakit di Myauk U, Rakhine yang diperkirakan akan selesai dibangun Oktober nanti. Jokowi menyalahkan kekerasan yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Beliau mengatakan bahwasanya diperlukan aksi nyata dan bukan hanya sekedar pernyataan berupa kecaman-kecaman semata. Pemerintah Indonesia berkomitmen akan terus membantu krisis kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di Indonesia dan juga masyarakat internasional.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi melakukan pertemuan dengan pemimpin *de facto* Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi pada Senin, 4 September 2017 di ibu kota Myanmar, Naypyidaw untuk membicarakan peran Indonesia dalam meredam kekerasan di Myanmar. Menteri Luar Negeri Indonesia hadir di Myanmar untuk menyampaikan kekhawatiran masyarakat Indonesia terhadap krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar. Menteri Luar negeri Indonesia juga membawa suara dunia Internasional agar krisis kemanusiaan di

Myanmar dapat segera dihentikan dan diselesaikan agar tidak banyak memakan semakin banyak korban jiwa.

10. Tanggapan Malaysia terhadap krisis kemanusiaan di Myanmar

Malaysia memanggil duta besar Myanmar di Malaysia untuk menyampaikan protes atas kekerasan yang menimpa etnis muslim minoritas Rohingya di Myanmar. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman, menyampaikan bahwa serangkaian kekerasan yang terjadi selama sepekan belakangan menunjukkan pemerintah Myanmar belum melakukan upaya keras untuk mencari solusi konflik di Rakhine. Kemlu Malaysia juga mengeluarkan imbauan perjalanan bagi warganya agar menghindari perjalanan ke Rakhine. Mereka juga meminta warganya yang sedang berada di Myanmar untuk waspada dan terus memantau perkembangan situasi keamanan di Rakhine (Samosir, 2017).

Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman menyebut kekerasan militer yang menimpa etnis minoritas Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, dapat mengancam stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Ia juga menyebut gelombang kekerasan terhadap etnis paling teraniaya di dunia itu sebagai bencana kemanusiaan. Menteri Luar Negeri Malaysia juga menyebut gelombang kekerasan terhadap etnis paling teraniaya di dunia itu sebagai bencana kemanusiaan. Anifah mendesak Myanmar untuk segera menyelesaikan konflik di Rakhine guna menghindari bencana kemanusiaan kembali terjadi. Pasalnya serangkaian kekerasan terhadap etnis minoritas Muslim di negara itu bukan hal baru. Malaysia, sebagai salah satu negara Muslim di kawasan ASEAN meluncurkan sejumlah protes keras terhadap pemerintah Myanmar yang dianggap telah membiarkan aksi pembersihan etnis Rohingya terjadi di negara itu (Suastha, 2016).

11. Tanggapan Amerika Serikat terhadap krisis kemanusiaan di Myanmar (Nursya'bani, 2017)

Amerika Serikat (AS) pada tanggal 22 November 2017 akhirnya secara resmi menyatakan kekerasan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar adalah bentuk pembersihan etnis. Pernyataan ini memberikan tekanan lebih besar kepada militer Myanmar untuk menghentikan tindakan kekerasan yang telah membuat lebih dari 600 ribu pengungsi Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Menteri Luar Negeri Rex Tillerson menyalahkan pasukan keamanan Myanmar dan warga setempat atas penderitaan yang dirasakan warga Rohingya. Meskipun militer Myanmar telah menyalahkan gerilyawan Rohingya karena telah memulai krisis, Tillerson mengatakan tidak ada provokasi yang dapat membenarkan kekejaman yang sangat mengerikan itu. Menurut Rex Tillerson, mereka yang melakukan kekejaman harus dimintai pertanggungjawaban. Ia juga menambahkan, Amerika Serikat menginginkan penyelidikan penuh dan akan mencari keadilan melalui undang-undang AS, termasuk kemungkinan untuk memberikan sanksi. Pernyataan tersebut disampaikan setelah proses peninjauan yang panjang oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Peninjauan dilakukan untuk menentukan apakah kekerasan tersebut telah mencapai ambang batas untuk bisa dianggap sebagai pembersihan etnis.

Tillerson, saat berkunjung ke Myanmar, mengatakan AS akan mempertimbangkan sanksi yang ditargetkan terhadap individu yang dianggap bertanggung jawab atas kekerasan tersebut. Namun dia tidak menganjurkan adanya sanksi ekonomi terhadap seluruh negara.